

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Adrian Sutedi, 2010, *Hukum Keuangan Negara*, Sinar Grafika, Jakarta
- Ali, Chidir, 1999, *Badan Hukum*, Penerbit Alumni: Bandung
- Ardhiwisastra, Yudha Bhakti, 1999, *Imunitas Kedaulatan Negara di Forum Pengadilan Asing*, Penerbit Alumni: Bandung
- Arifin P. Soeria Atmadja, 2010, *Keuangan Publik Dalam Perspektif Hukum Teori, Praktik, dan Kritik*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Asshiddiqie Jimly, 2010, *Konstitusi Ekonomi*, Penerbit Buku Kompas: Jakarta
- BEPEKA RI, 1998, *Hasil Pemeriksa Badan Pemeriksa Keuangan, Sejarah, Perspektif dan Prospeknya*, Sekretariat Jendral BEPEKA RI: Jakarta
- Busroh, Abu Daud, 1988, *Pemeriksaan Keuangan Negara*, PT Bina Aksara: Jakarta
- E, Utrecht, 1964, *Hukum administrasi Negara*, Djambatan: Jakarta
- Fahrojih, Ikhwan dan Mokh Najih, 2008, *Menggugat Peran DPR dan BPK dalam Reformasi Keuangan Negara*, In-TANS Publishing: Malang
- Firedman, W., 1972, *The States and The Rule of Law in A Mixed Economy*, Penguin Book: England
- Institusi Ilmu Keuangan, 30 Agustus- 5 September 1970, *Seminar tentang Indonesia he Comptabilites Wet*, Departemen Keuangan: Jakarta

- J. Wolhfof G, 1955, *Hukum Tata Negara Indonesia*, TimunMas: Jakarta
- Kamal Hidjaz, 2010, *efektifitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Pustaka Refleksi, Jakarta
- Kementrian Keuangan RI, 2007, *Modul Penatausahaan Kekayaan Negara Dipisahkan*, Pusdiklat Keuangan Umum Kemetrian Keuangan RI: Jakarta
- Rajagukguk, Erman, 2011, *Butir-Butir Hukum Ekonomi*, Lembaga Studi Hukum dan Ekonomi FHUI: Depok
- Ridwan HR., 2013, *Hukum Administrasi Negara*, PT Grafindo Persada, Jakarta
- Saidi, Muhammad Djafar, 2011, *Hukum Keuangan Negara*, PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta
- Sekretariat Jendral MPR RI, 2010, *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasam 1999-2000 Buku VII tentang Keuangan, Perekonomian Nasional, dan Kesejahteraan Sosial*, SEKJEN MPR RI: Jakarta
- Simatupang, Dian Puji N, 2011, *Paradoks Rasionalitas Perluasan Ruang Lingkup Keuangan Negara dan Implikasinnya terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah*, Badan Penerbit FHUI: Jakarta
- Soebagio, Dewi Triwoelan Wresningsih, 2008, *Ilmu Negara*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia: Depok
- Soenarko, R., 1950, *Susunan Negara Kita Jilid II*, Djambatan: Jakarta

Suhardi, Gunarto, 2007, *Revitalisasi BUMN*, Universitas Atma Jaya  
Yogyakarta: Yogyakarta

Sutedi, Andriani, 2011, *Good Corporate Governance*, Sinar Grafika: Jakarta

Yamin, Muhammad, 1971, *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945*,  
Jilid Pertama, Cetakan Kedua, Yayasan Prapanca: Jakarta

## **B. ARTIKEL, JURNAL DAN KUMPULAN TULISAN**

Atmadja, Arifin P. Soeria, 2010, *Badan Hukum Milik Negara Dalam Keuangan Publik*, PT RajaGrafindo Persada: Jakarta.

\_\_\_\_\_, 2010, *Keuangan Negara Pasca- Perubahan UUD 1945 Dalam Keuangan Publik*, PT RajaGrafindo Persada: Jakarta

\_\_\_\_\_, 2007, *Paradoks rasionalitas Kerugian Keuangan Badan Usaha Milik Negara Sebagai Kerugian Keuangan Negara (Suatu Kritik terhadap Kebijakan Neo-Konservatisme dalam Mendefinisikan Keuangan Negara di Indonesia, Dalam Modul Hukum Anggaran Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Indonesia: Depok*

\_\_\_\_\_, 2010, *Ruang Lingkup Keuangan Negara menurut Pasal 23 UUD 1945*, PT RajaGrafindo Persada: Jakarta

Kaihatu, Thomas S, 2006, *Good Corporate Governance dan Penerapan di Indonesia*, Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan Volume 8 No. 1.

Simatupang, Dian Puji N, 2007, *Arsitektur Keuangan Publik; Suatu Konsep Pengaturan Keuangan Negara dalam Bank BUMN*, Modul Hukum Anggaran Negara, FHUI: Depok

Tjager, I Nyoman, 2004, *Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance pada BUMN dalam kebijakan Fiskal Pemikiran, Konsep, dan Implementasi*  
Kompas: Jakarta

### **C. MAKALAH**

Asshiddiqie, Jimly, 19 Desember 2005, *Demokrasi dan Hak Asasi Manusia, Makalah disampaikan dalam studium general pada acara The 1st National Convergence Corporate Forum for Community Development.*: Jakarta

Atmadja, Arifin P. Soeria, 27 Juni 2002, *Aspek Hukum Kerugian Negara pada Perseroan Terbatas yang Sahamnya antara lain Dimiliki oleh Pemerintah,* Makalah disampaikan pada Diskusi Intern Fakultas Hukum Universitas Indonesia: Jakarta

\_\_\_\_\_, 30-31 Januari 1986, *Beberapa Aspek Yuridis Hak Budget DPR-RI.* Makalah disampaikan dalam Seminar Keuangan Negara: Jakarta

\_\_\_\_\_, 21 Juli 2009, *Harmonisasi Lembaga Pengawas Internal Pemerintah dan Lembaga Eksternal Pemerintah.* Makalah pada Seminar Refungsionalisasi Pengawasan Internal Pemerintah di FHUI: Depok

\_\_\_\_\_, 18 April 2006, *Landasan Hukum Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.* Makalah disampaikan pada diskusi Round Table dengan topik "Konsekuensi Putusan Judicial Review UU APBN 2006 terhadap Pembangunan, khususnya Bidang Pendidikan" yang diselenggarakan oleh Habibie Center dan Hanns Siedel Foundation: Jakarta

\_\_\_\_\_, 21 Juni 1997, *Reorientasi Penertiban Fungsi Lembaga Pengawasan dan Pemeriksaan Keuangan Negara.* Makalah disampaikan dalam Upacara Pengukuhan Jabatan Guru Besar Luar Biasa pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia: Jakarta

Pramono, Nindyo 7 Desember 2006, *Kekayaan Negara yang Dipisahkan menurut UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN.* Makalah disampaikan dalam seminar Persembahan kepada Sang Maha Guru "Permasalahan Seputar Hukum Bisnis: Yogyakarta

Rajagukuguk, Erman, 20 April 2007, *PP 33 Tahun 2006 Dan Implikasinya Bagi Penyelesaian Utang Piutang BUMN.* Makalah disampaikan pada seminar nasional Risiko Hukum dan Bisnis dalam Investasi BUMN & BUMD: Implikasi Penerbitan PP 33 Tahun 2006 tentang Piutang Negara" diselenggarakan oleh Ikatan Alumni Universitas Diponegoro dan INFO BANK: Jakarta

Simatupang, Dian Puji N, 29 April 2006, *Arsitektur Keuangan Publik: Suatu Konsep Pengaturan Keuangan Negara dalam Bank BUMN.* Makalah disampaikan dalam Diskusi Panel Level of Playing Field Bank BUMN yang diselenggarakan Wartawan Keuangan dan Perbankan: Bandung

Sukardi Laksamana, 2 Juli 2002, *Keterangan Menteri BUMN Mewakili Pemerintah mengenai Rancangan Undang-undang tentang BUMN.* Makalah disampaikan pada rapat pembahasan RUU BUMN dengan DPR: Jakarta

#### **D. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar 1945 Sebelum Perubahan.

Undang-Undang Dasar 1945 Perubahan Ketiga.

Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1964 tentang Pembentukan Badan Pemeriksa Keuangan Menjadi Undang-Undang. UU No. 17 Tahun 1965. LN Nomor 79 Tahun 1965. TLN Nomor 2776.

Undang-Undang tentang Keuangan Negara. UU No. 17 Tahun 2003. LN Nomor 47 Tahun 2003. TLN Nomor 4286.

Undang-Undang tentang Badan Usaha Milik Negara. UU No. 19 Tahun 2003. LN Nomor 70 Tahun 2003. TLN Nomor 4297.

Undang-Undang tentang Pembendaharaan Negara. UU No. 1 Tahun 2004. LN Nomor 5 Tahun 2004. TLN Nomor 4355.

Undang-Undang tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. UU No. 15 Tahun 2004. LN Nomor 66 Tahun 2004. TLN Nomor 4400.

Undang-Undang tentang Badan Pemeriksa Keuangan. UU No. 15 Tahun 2006. LN Nomor 85 Tahun 2006. TLN Nomor 4654.

Undang-Undang Perseroan Terbatas. UU No. 40 Tahun 2007. LN Nomor 106 Tahun 2007. TLN Nomor 4756.

Undang-undang tentang Akuntan Publik. UU No. 5 Tahun 2011. LN Nomor 51 Tahun 2011. TLN Nomor 5215.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Perpu No. 7 Tahun 1963. LN Nomor 95 Tahun 1963.

Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas. PP No. 44 Tahun 2005. LN Nomor 116 Tahun 2005. TLN Nomor 4555.

Peraturan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara. Permeneg BUMN No. PER-01/MBU/2011.

Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Peraturan BPK No. 1 Tahun 2007.

#### **E. INTERNET**

Fiscal News, *BPK Tak Bisa Lagi Langsung Periksa Keuangan BUMN*,  
<http://www.depkeu.go.id/ind/Data/bpk28604.htm>. Diunduh 16 September

<https://agusroniarbaben.wordpress.com/2017/06/03/pengertiankewenangan-sumber-sumber-kewenangan-dan-kewenangan-membentuk-undang-undang/>

[https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj\\_goqN8v\\_XAhUV57wKHR88BIMQFggyMAl&url=http%3A%2F%2Fdigilib.unila.ac.id%2F10556%2F12%2FBAB%2520II.pdf&usq=AOvVaw2Dn4Ofsu\\_9EbVeEh5AERuJ](https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj_goqN8v_XAhUV57wKHR88BIMQFggyMAl&url=http%3A%2F%2Fdigilib.unila.ac.id%2F10556%2F12%2FBAB%2520II.pdf&usq=AOvVaw2Dn4Ofsu_9EbVeEh5AERuJ)

<http://erepo.unud.ac.id/9969/3/eecba88f730f21dfa9f03ed5fafba38d.pdf>

Rajagukguk, Erman, *Kekayaan BUMN Persero bukan Kekayaan Negara*,  
[http://www.unisosdem.org/articledetail.php?aid=6831&coid=2&caid=30  
&gid=3](http://www.unisosdem.org/articledetail.php?aid=6831&coid=2&caid=30&gid=3). Diunduh 23 September 2017